



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 18 TAHUN 2020**

#### **TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tahun 2007, Gubernur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan unit kerja mandiri dibawahnya dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta akuntabilitas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, diperlukan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019-2024.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud penetapan IKU Pemerintah Provinsi sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pembangunan di Provinsi Riau.
- (2) Maksud penetapan program dan indikator program RPJMD sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan *outcome* pembangunan di Provinsi Riau.
- (3) Maksud penetapan IKU Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 3**

Tujuan penetapan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah yaitu:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU PEMERINTAH PROVINSI, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM RPJMD DAN IKU PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 4**

Pemilihan dan penetapan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah selaras dengan:

- a. Dokumen RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
- e. Perkembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN IKU PEMERINTAH PROVINSI, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM RPJMD DAN IKU PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 5**

IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

### **Pasal 6**

- (1) Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan pencapaian IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah;
- (2) IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

## **BAB IV PELAKSANAAN, PEMBINAAN, KOORDINASI, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau melalui Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (3) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (4) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan IKU Pemerintah Provinsi, Program dan Indikator Program RPJMD dan IKU Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 April 2020

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH/PROVINSI RIAU,**

ttd.

**YAN PRANA JAYA**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 19

Disalinkan tanggal 4 Mei 2020  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**

Pembina Tingkat I  
No.P.19650823 199203 2 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun Harapan lama sekolah Angka harapan hidup	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ $IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{laki-laki}}$	Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik
1.2	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	Laporan hasil survei Indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama RI dengan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Kementerian Agama

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Laporan hasil survei Indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama RI dengan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Kementerian Agama
2.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur		Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar	<p>Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar (%) (peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/ dermaga/ bandara pertahun, Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak)</p> $\frac{\text{Pergerakan orang/barang}_{(n)} - \text{Pergerakan orang/barang}_{(n-1)}}{\text{Pergerakan orang/barang}_{(n-1)}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya pelayanan transportasi		Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/ dermaga/ bandara pertahun	$\frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyediaan air curah lintas kab/kota}}{\sum \text{Demand Kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di provinsi, ybs}} \times 100\%$ <p>Pembilang : Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota  Penyebut : Jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi	$\frac{\text{Jumlah KK pelanggan PLN dan non PLN}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik	$\frac{\text{luas lahan pertanian yang teririgasi dengan baik}}{\text{luas lahan pertanian}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.2	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (RIAU HIJAU)		Indeks lingkungan hidup	$\text{IKLH Provinsi} = (\text{IPA} \times 30\%) + (\text{IPU} \times 30\%) + (\text{ITH} \times 40\%)$ <p>Di mana : IKLH Provinsi = indeks kualitas lingkungan hidup tingkat Provinsi  IPA = indeks pencemaran air  IPU = indeks pencemaran udara  ITH = indeks tutupan hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_{Rata-rata} + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_{Maksimum}}{2}}$ <p> <math>0 \leq Pij \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; Pij \leq 5,0 \rightarrow</math> cemaran ringan  <math>5,0 &lt; Pij \leq 10,0 \rightarrow</math> cemaran sedang  <math>Pij &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemaran berat            IKU = <math>100 - [50/0.9 \times (Icu - 0.1)]</math> </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>
			Indeks Udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Icu - 0.1)]$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times (50/54,3))$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>
		Menurunnya emisi gas rumah kaca	emisi gas rumah kaca	$\text{Emisi Gas Rumah Kaca (satuan berat CO2 Ekuivalen)} = \text{Data Aktivitas} \times \text{Faktor Emisi}$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.1	Mewujudkan perekonomian		Laju pertumbuhan ekonomi	$\frac{(\text{PDRB HK (DM/TM) tahun } t) - (\text{PDRB HK (DM/TM) tahun } t - 1)}{(\text{PDRB HK (DM/TM) tahun } t - 1)} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	yang mandiri dan berdaya saing				
	Meningkatnya kemandirian ekonomi menurunkan kesenjangan pendapatan	Meningkatnya kemandirian ekonomi menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHK	<p>Nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dalam 1 (satu) tahun</p>	Badan Pusat Statistik
			Koefisien Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana:  <i>P<sub>i</sub></i> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-<i>i</i>  <i>Q<sub>i</sub></i> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-<i>i</i>            Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ <math>G &lt; 0,3</math> = ketimpangan rendah</li> <li>☐ <math>0,3 \leq G \leq 0,5</math> = ketimpangan sedang</li> <li>☐ <math>G &gt; 0,5</math> = ketimpangan tinggi</li> </ul>	Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sisi konsumsi dalam 1 (satu) tahun	Badan Pusat Statistik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	$100 - (H(G + (1 - G)^p + 0,5Q(1 - H(G + (1 - G)^p))) 100$ <p>Dimana:  H : rasio penduduk yang mengalami kekurangan pangan terhadap jumlah penduduk  G: proporsi angka kekurangan energi terhadap angka rata-rata kebutuhan energi  I<sup>p</sup> : ketimpangan dalam distribusi yang diukur dengan koefisien GINI dari distribusi konsumsi energi  Q : koefisien variasi DES ketersediaan energi untuk konsumsi energi/protein</p>	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Persentase penduduk miskin	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Dimana:  <math>\alpha = 0</math>  z = garis kemiskinan  y<sub>i</sub> = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y<sub>i</sub> &lt; z  q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  n = jumlah penduduk</p>	Badan Pusat Statistik
		Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	$\frac{\text{jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
4.1	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu		Persentase pemajuan Budaya Melayu Riau Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Perlindungan	$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan}}{\sum \text{data Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan
		Meningkatnya Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pengembangan	$\frac{\text{Jumlah Obyek Kebudayaan yang Dikembangkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan
			Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang Mendapatkan Pemanfaatan	$\frac{\text{Jumlah Obyek Kebudayaan yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan
4.2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata		Jumlah Pengeluaran wisatawan mancanegara	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dalam satu tahun (Milyar Rupiah)	Dinas Pariwisata

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya kunjungan wisatawan Mancanegara	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Orang)	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kenyamanan wisatawan Mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan dalam satu tahun	Dinas Pariwisata
5.1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.	Sekretariat Daerah
			Indeks reformasi birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penyelenggaraan Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) area perubahan yaitu: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik.	Sekretariat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya penerapan e-government	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.	Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika

**GUBERNUR RIAU.**

ttd.

**SYAMSUAR**

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU****NOMOR** : 18 Tahun 2020**TANGGAL** : 3 April 2020**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU**

<b>NO</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</b>
	<b>Program Non Urusan</b>	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat kehadiran ASN
	<b>Dinas Pendidikan</b>	
4.	Program Penyelenggaraan Pendidikan Menengah	APK SMA Sederajat APM SMA Sederajat Akreditasi sekolah SMA sederajat dengan nilai minimal b
5.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Persentase anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses pendidikan
6.	Program Bantuan Operasional sekolah	Menurunnya angka putus sekolah
7.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi guru SMA/SMK dengan tingkat pendidikan > D4/S1 Jumlah siswa miskin yang dibantu Jumlah siswa dan mahasiswa yang diberikan beasiswa
	<b>Dinas Kesehatan</b>	
8.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persalinan di fasilitas kesehatan Kunjungan Antenatal (k4) Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap )

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
9.	Program Pembiayaan Kesehatan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Persentase masyarakat miskin yang mempunyai jaminan kesehatan
10.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase capaian indikator kinerja FKTL sesuai standar Persentase FKTP sesuai standar Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Persentase manajemen kesehatan dengan sistem informasi kesehatan Persentase kepuasan pelanggan atas pelayanan laboratorium Persentase Odha yang diobati Success Rate TB paru Annual Parasit Indeks (API)
11.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase capaian Immunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi usia 0-11 bulan Persentase Kab/Kota yang merespon Alert sinyal kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (KLB) > 80% Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasyankes yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar Persentase produksi dan distribusi farmasi dan alkes sesuai standar Persentase ketersediaan obat, vaksin dan logistik
12.	Program Pelayanan Kefarmasian dan Alkes	Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar
13.	Program Pengembangan Dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase pelaksanaan diklat kesehatan yang sesuai standar Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
14.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan <b>Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad</b>	Persentase fasyankes yang mempunyai sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar
15.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian pelayanan penunjang klinik dan non klinik rumah sakit arifin achmad Persalinan di fasilitas kesehatan Kunjungan Antenatal (k4) Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap ) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun / balita Persentase capaian standar akreditasi Rumah Sakit Arifin Achmad Persentase sarana dan prasarana rs memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Arifin Achmad Persentase capaian standar pelayanan minimal Rumah Sakit Arifin Achmad
16.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
17.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	
18.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUID RS <b>Rumah Sakit Jiwa Tampan</b>	
19.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian pelayanan penunjang klinik dan non klinik rumah sakit Jiwa Tampan Persalinan di fasilitas kesehatan Kunjungan Antenatal (k4) Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap ) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun / balita Persentase capaian standar akreditasi Rumah Sakit Jiwa Tampan
20.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
21.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	
22.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUID RS <b>Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi</b>	Persentase sarana dan prasarana rs memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Jiwa Tampan Persentase capaian standar pelayanan minimal Rumah Sakit Jiwa Tampan

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
23.	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	<p>Persentase capaian pelayanan pemunjang klinik dan non klinik rumah sakit Petala Bumi</p> <p>Persalinan di fasilitas kesehatan</p> <p>Kunjungan Antenatal (k4)</p> <p>Kunjungan Neonatal lengkap (KN lengkap )</p> <p>Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita</p>
24.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	<p>Persentase capaian standar akreditasi Rumah Sakit Petala Bumi</p>
25.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	<p>Persentase sarana dan prasarana rs memenuhi standar untuk mendukung akreditasi rumah sakit Petala Bumi</p>
26.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	<p>Persentase capaian standar pelayanan minimal Rumah Sakit Petala Bumi</p>
27.	<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan</b>	
28.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Aspal)</p> <p>Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Rigid)</p> <p>Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Kerikil)</p> <p>Persentase Kondisi Jalan berdasarkan Perkerasan (Tanah)</p>
29.	Program Preservasi Jalan dan Jembatan	<p>Presentase kemantapan ruas jalan Provinsi</p>
30.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	<p>Persentase daerah rawan abrasi yang ditangani</p> <p>Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik</p>
31.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	<p>Persentase bangunan dan kawasan strategis provinsi yang ditangani</p>
32.	Program Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	<p>Presentase peningkatan layanan air minum</p> <p>Presentase peningkatan layanan sanitasi</p>
33.	Program Penataan Ruang	<p>Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</p>
34.		<p>Penurunan luasan kawasan permukiman kumuh</p>

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
33.	Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman
34.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan akses rumah sehat layak huni bagi rumah tangga miskin
35.	Program Penyelenggaraan Pertanahan	Persentase urusan pertanahan yang terfasilitasi
36.	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b> Program Penegakan Peraturan Daerah	Persentase peraturan daerah yang ditegakkan
37.	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase ketertarikan dan ketertiban umum yang dilaksanakan
38.	<b>Dinas Sosial</b> Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
39.	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah pmks yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi dasar kesejahteraan sosial
40.	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (psks) yang diberdayakan
41.	Program Penanganan Fakir Miskin	Jumlah pmks yang diberdayakan
42.	<b>Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi</b> Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kapasitas sdmnya
43.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan
44.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial
45.	Program Penyelenggaraan Ketramigrasian	Persentase perusahaan yang mendapatkan pembinaan hubungan industrial
46.	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b> Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase penyelesaian kasus norma ketenagakerjaan
		Persentase pengembangan kawasan transmigrasi
		Persentase kelembagaan pengarusutamaan Gender yang aktif

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
47.	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani Persentase Kabupaten/kota menuju Kabupaten/Kota layak anak
48.	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase perempuan dalam peningkatan ekonomi
49.	Program Keluarga Berencana	Persentase KB aktif Mediam kawin pertama
50.	<b>Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura</b> Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH Ketersediaan Skor PPH Konsumsi
51.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian	Produksi Padi Produksi Jagung Produktivitas tanaman utama (padi) Produktivitas tanaman utama (jagung) Persentase petani yang menerapkan teknologi pasca panen Persentase penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya
52.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	
53.	<b>Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</b> Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kualitas Udara Persentase Peningkatan Kualitas Air
54.	Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
55.	Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase penurunan luasan lahan kritis
	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>	

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
56.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase tertib administrasi kependudukan
57.	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dan kelurahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik
58.	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga di Desa	Persentase lembaga desa aktif
59.	<b>Dinas Perhubungan</b> Program Perhubungan Darat	Presentase tersediannya prasana perhubungan darat yang layak
60.	Program Perhubungan Laut	Presentase tersediannya prasana perhubungan laut yang layak
61.	Program Bina Sistem Transportasi	Presentase sistem transportasi antar dan inter moda yang terintegrasi
62.	<b>Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik</b> Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Presentase sistem informasi dan aplikasi yang dikelola
63.	Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Presentase indikator spbe yang terpenuhi
64.	Program Penyelenggaraan Statistik	Presentase data sektoral yang tersusun
65.	Program Penyelenggaraan Persandian	Presentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi
66.	<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah</b> Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Jumlah Usaha kecil yang ditingkatkan skala usahanya Jumlah koperasi aktif yang bersertifikat A
67.	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pengaduan masyarakat terhadap harga / mutu produk yang tidak sesuai standar yang diselesaikan
68.	Program peningkatan dan pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri	Persentase terfasilitasi ketersediaan barang pokok
69.	Program kerjasama, fasilitasi dan pengembangan perwilayahan industri	Jumlah Kawasan Industri yang Beroperasi Jumlah SIKIM yang beroperasi

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
70.	Program penumbuhan dan pengembangan industri	<p>Persentase pertumbuhan industri besar</p> <p>Persentase pertumbuhan nilai output industri</p>
71.	<p><b>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b></p> <p>Program Peningkatan Investasi</p>	Jumlah nilai realisasi investasi pma/pmdn
72.	Program Penyelenggaraan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat
73.	<p><b>Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga</b></p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Kepemudaan</p>	Jumlah pemuda pelopor
74.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga	<p>Jumlah pemuda kader</p> <p>Jumlah wirausaha muda</p> <p>Jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi</p>
75.	<p><b>Dinas Kebudayaan</b></p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Kebudayaan</p>	Persentase objek pemajuan yang dikelola dan dikembangkan
76.	<p><b>Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan</b></p> <p>Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan</p>	Indeks kepuasan masyarakat
77.	Program Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip	Penilaian/ predikat kearsipan
78.	<p><b>Dinas Kelautan Dan Perikanan</b></p> <p>Program Pengembangan Budaya Perikanan</p>	Jumlah produksi perikanan budidaya
79.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap
80.	Program Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Pesisir dan Laut	Persentase peningkatan kesadaran hukum (pelaku usaha yang taat hukum)
	<b>Dinas Pariwisata</b>	Persentase pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
81.	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah produk pariwisata yang berhasil dipasarkan
82.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang ditingkatkan daya tariknya
83.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Jumlah sdm profesi pariwisata yang dibina
84.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif
	<b>Dinas Perkebunan</b>	Jumlah produk ekonomi kreatif
85.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan	Produksi kelapa sawit
		Produksi kelapa
		Produksi karet
		Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa sawit / CPO)
		Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa)
		Produktivitas tanaman perkebunan (karet)
		Produktivitas tanaman perkebunan (sagu)
86.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Perkebunan	Persentase sdm yang ditingkatkan kompetensinya
	<b>Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan</b>	
87.	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase angka kematian ternak
88.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah populasi ternak
	<b>Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral</b>	
89.	Program Pengelolaan Pertambangan	Persentase peningkatan pemegang iup yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)
90.	Program Pengembangan Energi dan Ketemagalistrikan	Rasio Desa Berlistrik
91.	Program Pengembangan kegeologian	Persentase legalitas pengusahaan air tanah

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan</b>	
92.	Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
93.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah
94.	Program Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Persentase kerjasama yang difasilitasi
	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>	
95.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Angka penerimaan daerah
	<b>Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah</b>	
96.	Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
97.	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas
	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	
98.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan
99.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur
	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	
100.	Program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia
	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	
101.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana
	<b>Badan Penghubung</b>	

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
102.	Program Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung	Persentase layanan terhadap stakeholder
	<b>Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>	
103.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pengembangan wawasan kebangsaan
104.	Program Pendidikan Politik	Persentase pendidikan politik
	<b>Sekretariat Daerah</b>	
105.	Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kedinasan pimpinan
106.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
107.	Program Reformasi Birokrasi	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan area perubahan reformasi
108.	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah
109.	Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan	Persentase pencapaian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi informasi dan kehumasan
110.	Program Penataan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase terfasilitasinya penataan pemerintahan dan otonomi daerah
111.	Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial	Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial
112.	Program Penataan Kebijakan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan penataan kebijakan pemerintah bidang perekonomian dan sumber daya alam
113.	Program Pembinaan Pengelolaan BUMD	Persentase BUMD berkinerja baik
114.	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian evaluasi pembangunan
	<b>Sekretariat DPRD</b>	
115.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Presentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	<b>Inspektorat</b>	
116.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase realisasi audit/jumlah laporan hasil audit
117.	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase jumlah laporan hasil evaluasi dan jumlah opd yang difasilitasi

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 18 Tahun 2020**

**TANGGAL : 3 April 2020**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU**

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata - rata Lama Sekolah</li> </ul>	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <ul style="list-style-type: none"> <li>RLS = Rata - rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</li> <li>Xi = Lama sekolah penduduk ke i yang berusia 25 tahun</li> <li>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Harapan Lama Sekolah</li> </ul>	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <ul style="list-style-type: none"> <li><math>HLS_a^t</math> = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t</li> <li><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</li> <li>I = usia (a, a=1,...., n)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>APK SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C (%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Murid Keseluruhan SMA, MA, SMK, SMALB, Paket C</li> <li>Jumlah Penduduk Usia 16 – 18th</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Murid Keseluruhan SMA, MA, SMK, SMALB, Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18th}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>APM SMA/MA/SMK/SMALB/ Paket C (%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Murid usia 16 – 18 thn jenjang SMA, MA, SMK, SMALB, Paket C</li> <li>Jumlah penduduk usia 16 – 18 th</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Murid usia 16 – 18 thn jenjang SMA, MA, SMK, SMALB, Paket C}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 th}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase sekolah SMA yang berakreditasi minimal B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah SMA yang berakreditasi minimal B</li> <li>Jumlah SMA seluruhnya</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah SMA yang berakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah SMA seluruhnya}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase program keahlian SMK yang berakreditasi minimal B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah SMK yang berakreditasi minimal B</li> <li>Jumlah SMK seluruhnya</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah SMK yang berakreditasi minimal B}}{\text{Jumlah SMK seluruhnya}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase guru SMA/SMK yang telah memenuhi kualifikasi D4/S1</li> <li>Angka Putus Sekolah</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah guru SMA, SMK yang dikualifikasi S1, D4}}{\text{Seluruh guru}} \times 100\%$
2.	DINAS KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penurunan Kematian Ibu</li> <li>Persentase Penurunan Kematian Bayi</li> <li>Persentase Penurunan KeSmatian Balita</li> <li>Persentase Stunting</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kematian Ibu pada tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Kematian Ibu tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kematian Ibu sebelumnya}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah kematian Bayi pada tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Kematian Bayi tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kematian Bayi sebelumnya}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah kematian Balita pada tahun sebelumnya} - \text{Jumlah Kematian Balita tahun berjalan}}{\text{Jumlah Kematian Balita sebelumnya}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah Balita pendek dan sangat pendek berdasarkan Indikator TB / U(Tinggi Badan dibagi Umur)}}{\text{Jumlah Balita yang diukur tinggi badannya}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase ODHA yang diobati</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah ODHA (Orang dengan HIV AIDS) yang diobati}}{\text{Jumlah ODHA hasil estimasi}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular</li> </ul>		$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 15 - 59 tahun yang dilakukan deteksi dini (screening)}}{\text{Jumlah Penduduk usia 15 - 59 tahun}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pencapaian Universal Health Coverage</li> </ul>		$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Success Rate (SR)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Pasien Baru TB BTA Positif (Pasien Sembuh + Pengobatan Lengkap)}}{\text{Jumlah Pasien Baru TB BTA Positif yang diobati}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk berdampak Krisis Kesehatan akibat dan/atau berpotensi Bencana</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana / berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indek Keluarga Sehat</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Keluarga dengan IKS} > 0,800 \text{ (Keluarga sehat 12 Indikator)}}{\text{Jumlah Keluarga terdata di PIS PK (Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga)}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kesehatan Terakreditasi Fasilitas yang</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Masyarakat Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesehatan</li> </ul>	$\frac{\text{Komulatif nilai setiap unsur pelayanan dari pengguna UPT Pelayanan Kesehatan yang disurvei}}{\text{Jumlah Pasien yang disurvei}}$
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Masyarakat (IKM) Kepuasan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah nilai per unsur Keusioner yang terisi}}{\text{X Nilai tertimbang perunsur (0,111)}}$ <p>Kepmenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggara Pelayanan Publik</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase capaian kualitas indikator pelayanan kesehatan sesuai standar</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah capaian indikator pelayanan kesehatan di RSUD Arifin Achmad}}{\text{Jumlah capaian indikator pelayanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\%$
4.	RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>Tingkat Akreditasi</li> </ul>	$\frac{\text{Total dari nilai per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ $\frac{\text{Akumulasi nilai skor masing - masing standar yang terdapat dalam bab Akreditasi}}{\text{Kriteria hasil penilaian elemen EP}} \times 100\%$ <p>Jumlah nilai minimal 80% dari 15 Bab yang di survey</p>
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentase Pemenuhan Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kriteria klasifikasi RS Jiwa Kelas A yang sudah terpenuhi}}{\text{Jumlah Kriteria Klasifikasi RS Jiwa Kelas A yang harus di ganti}} \times 100\%$
5.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> <li>Tingkat Akreditasi Rumah Sakit</li> </ul>	$\frac{\text{Kumulatif Hasil Penilaian Kepuasan Peanggan/Masyarakat}}{\text{Jumlah Pasien yang di Survey}} \times 100\%$ $\frac{\text{Akumulasi nilai skor masing - masing standar yang terdapat dalam bab Akreditasi}}{\text{Kriteria hasil penilaian elemen EP}} \times 100\%$
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase jalan dan jembatan yang dibangun</li> <li>Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Panjang ruas jalan yang dibangun}}{\sum \text{Panjang jalan provinsi riau yang dibangun}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{panjang ruas jalan provinsi kondisi mantap}}{\sum \text{panjang jalan provinsi riau}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum</li> </ul>	$\frac{\sum \text{warga negara yang memperoleh air minum melalui perpipaan}}{\sum \text{target penduduk yang menerima air minum melalui perpipaan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya</li> </ul>	Jumlah wilayah regional yang terkelola sanitasinya
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Luas lahan pertanian beririgasi}}{\sum \text{Luas lahan pertanian fungsional pada kewenangan provinsi}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• indeks ketahanan air</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Luas lahan pertanian fungsional pada kewenangan provinsi}}{\text{indeks ketahanan air}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang</li> </ul>	$= \frac{\sum \text{pemanfaatan ruang yang sesuai}}{\sum \text{pemanfaatan ruang yang diatur}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelaksanaan Urusan Pertanahan yang Diselenggarakan</li> </ul>	$= \frac{\sum \text{Layanan Pertanahan yang dapat ditangani}}{\sum \text{Layanan Pertanahan yang masuk}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata</li> </ul>	$= \frac{\sum \text{bangunan yang diselenggarakan}}{\sum \text{bangunan strategis}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Peningkatan Kualitas Permukiman</li> </ul>	$= \frac{\sum \text{Permukiman yang ditangani}}{\sum \text{target permukiman yang ditangani}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan SPAM</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Permukiman yang ditingkatkan layanan SPAM Permukiman}}{\sum \text{target penyediaan layanan SPAM Permukiman}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Permukiman Perkotaan dan Lintas Kabupaten Kota yang Ditingkatkan Layanan Sanitasi (Drainase)</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Permukiman yang ditingkatkan layanan sanitasi permukiman}}{\sum \text{Target penyediaan layanan sanitasi permukiman}} \times 100\%$

FORMULASI PERHITUNGAN	
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Peningkatan Akses Rumah Sehat Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin</li> </ul> $\frac{\sum \text{Penyediaan Rumah Layak Huni (n)}}{\sum \text{Target kebutuhan penyediaan rumah layak huni}} \times 100\%$
7.	<p>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat</li> <li>Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah pelaksanaan pemeliharaan Trantibum dan Transmas}}{\text{Jumlah pemeliharaan Trantibum dan Transmas harus dilaksanakan (Titik pengaman, permintaan pengamanan Trantibum dan Transmas serta laporam masyarakat melalui usat pengaduan)}} \times 100\%$
8.	<p>DINAS SOSIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Jiwa Penyandang Masalah Sosial (PMKS)</li> <li>Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial</li> <li>Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berjalan sesuai peran dan fungsinya</li> <li>Persentase Partisipasi Tingkat Angkatan Kerja</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Perda / Perkadayang ditegakkan}}{\text{Jumlah Perda/Perkada yang ditetapkan untuk ditegakkan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perda / Perkadayang ditegakkan}}{\text{Total Jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia (PMKS)}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk usia kerja}} \times 100\%$
9.	<p>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial melalui program dan kegiatan dinas sosial provinsi riau</li> <li>Total PSKS yang diberdayakan melalui program dan kegiatan dinas sosial provinsi riau</li> </ul>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja terlatih yang terserap}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang terlatih}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pemenuhan persyaratan - Syarat Kerja</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan wajib memnuhi pengaturan}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pemenuhan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang dibina se Provinsi Riau}}{\text{Jumlah perusahaan (Berdasarkan WLKP se Provinsi Riau)}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Transmigrasi yang diberdayakan dan dikembangkan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Kawasan transmigrasi yang diberdayakan dan di kembangkan}}{\text{Jumlah kawasan transmigrasi}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kawasan Transmigrasi yang diberdayakan dan dikembangkan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Kawasan transmigrasi yang diberdayakan dan di kembangkan}}{\text{Jumlah kawasan transmigrasi}} \times 100\%$
10.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</li> </ul>	$\frac{\text{par} + \text{IDM} + \text{Linc} - \text{Dist}}{3}$ <p>Ipar : Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)  IDM : Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)  linc-dist : Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan lama ditambah kasus baru}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas terlatih di dalam Unit Layanan Terpadu</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan yang dilayani pada unit layanan terpadu}}{\text{Jumlah Perempuan dan anak korban kekerasan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TFR (Total Fertility Rate)</li> </ul>	$\text{TFR} = 5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFRI}$ $\text{ASFRI} = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ <p> TFR : Angka kelahiran total  ASFIR : Angka kelahiran menurut kelompok umur  Bi : jumlah kelahiran daari perempuan pada kelompokm umur I pada tahun tertentu  Pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur I pada pertengahan tahun yang sama  I : kelomok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20 – 24, i=7 unuok kelompok umur 45-49  K : bilangan konstan biasanya 1000 </p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi (CPR) (%)</li> </ul>	<p>Jumlah perempuan usia reproduksi (15 – 49 thn) atas pasangannya dengan kebutuhan alat kontrasepsi yang menggunakan alat kontrasepsi _____ x100%</p> <p>Jumlah Perempuan usia reproduksi (15 – 49 Thn) atau pasangannya yang memerlukan alat kontrasepsi</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Median Kawin Pertama Perempuan (Tahun)</li> </ul>	<p>Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu</p>
11.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</li> </ul>	<p>(30% x IKA)+(30% x IKU)+(40% x IKTL)</p> <p>a. IKA : Indeks Kualitas Air</p> <p>b. IKU : Indeks Kualitas Udara</p> <p>c. IKTL : Indeks Kualitas Turunan Lahan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Tutupan Lahan</li> </ul>	<p>IKTL=0,23 ITH+0,24 IPH+0,30 IKT+0,15 IKBA +0,08</p> <p>IKH : Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>IKLT : Indeks Tutupan Hutan</p> <p>ITH : Indeks Performance Hutan</p> <p>IPH : Indeks Kondisi Tutupan Tanah</p> <p>IKT : Indeks Konservasi Badan Air</p> <p>IKBA : Indeks Kondisi Habit</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Air</li> </ul>	$PI = \frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_M - \left(\frac{Ci}{Lij}\right)^2_R}{2}$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
			<p>a. <math>P_{ij}</math> : Indeks Pencemaran Indeks Tutupan Hutan</p> <p>b. <math>C_i</math> : Konsentrasi Parameter Kualitas air ke (j)</p> <p>c. <math>L_{ij}</math> : Menyatakan Konsentrasi parameter kualitas air i yg dicantumkan dalam buku mutu peruntukan air j</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kualitas Udara</li> </ul>	$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0.9} X (I_{eu} - 0.1) \right)$ <p>Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konservasi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100%.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca</li> </ul>	$\frac{\text{Besaran Emisi GRK Tahun } i - \text{Besarana GRK tahun sebelumnya}}{\text{Besaran Emisi GRK Tahun sebelumnya}} \times 100$ <p>I = Tahun yang ingin diketahui</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah</li> </ul>	$\frac{\text{Besaran Emisi GRK tahun } i - \text{Besaran emisi GRK tahun sebelumnya}}{\text{Besaran Emisi GRK Tahun sebelumnya}} \times 100$ <p>I = Tahun yang ingin diketahui</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan</li> </ul>	$\frac{\text{Besaran Emisi GRK tahun } i - \text{Besaran emisi GRK tahun sebelumnya}}{\text{Besaran Emisi GRK Tahun sebelumnya}} \times 100$ <p>I = Tahun yang ingin diketahui</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Masyarakat</li> <li>• Kepuasan Masyarakat</li> <li>• Persentase pengguna yang memanfaatkan database kependudukan</li> <li>• Persentase Desa/ Kelurahan Berkembang di Provinsi Riau</li> <li>• Persentase Kelembagaan masyarakat perdesaan yang Aktif dalam Pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>• Persentase lembaga Ekonomi desa yang Aktif</li> <li>• Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik</li> <li>• persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yang akuntabel</li> </ul>	<p>Respon masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (diukur melalui instrument khusus)</p> $\frac{\text{Jumlah OPD pengguna pemanfaatan database kependudukan}}{\text{Jumlah OPD Se Prov. Riau}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Desa dan Kel. Cepat BERkembang}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah LKD yang aktif}}{\text{Jumlah LKD Se Prov. Riau}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah BUMDes aktif}}{\text{Jumlah BUMDesa Se Prov. Riau}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Desa penyelenggaraan desa yang baik}}{\text{Jumlah Desa Se Prov Riau}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Desa dengan pengelolaan keuangan dan aset desa yg akuntabel}}{\text{Jumlah Desa Se Prov Riau}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
13.	DINAS PERHUBUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Transportasi</li> </ul>	$\frac{a + b + c + d + e}{5} \times 100\%$ <p>A. Persentase Peningkatan Layanan Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi</p> <p>B. Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Jalan Dalam Provinsi</p> <p>C. Jumlah Dokumen Pengembangan System Transportasi Dan Integrasi Antar Moda</p> <p>D. Persentase Capaian Layanan Transportasi Perairan</p> <p>E. Persentase SDM Bidang Teknis Perhubungan Yang Ditingkatkan Kompetesinya</p>
14.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> </ul>	<p>Hasil Penjumlahan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Kebijakan Internal di kali 17%</li> <li>Indikator Tata Kelola SPBE di kali 28%</li> <li>Indikator Layanan SPBE di Kali 55%</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Kebijakan Internal yang tahap optimum dalam penilaian SPBE (17 INDIKATOR)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah dari nilai tingkat kematangan}}{\text{jumlah indikator}} \times 17\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Tata Kelola SPBE yang mencapai tahap optimum dalam penilaian SPBE (7 INDIKATOR)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah dari nilai tingkat kematangan}}{\text{jumlah indikator}} \times 28\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indikator Layanan SPBE yang mencapai tahap optimum dalam penilaian SPBE (11 INDIKATOR)</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah dari nilai tingkat kematangan}}{\text{jumlah indikator}} \times 55\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Data Sektoral dan Spasial per Kewenangan Urusan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah keterisian data}}{\text{jumlah komponen data keseluruhan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Keamanan Informasi Pemerintah</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menerima Layanan Keamanan Informasi}}{\text{Seluruh Perangkat Daerah}} \times 100\%$
15.	<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai produk sector industry terhadap PDRB</li> </ul>	Kontribusi sektor nilai industri terhadap total PDRB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kawasan industri yang beroperasi</li> </ul>	Jumlah kawasan industry provinsi yang sudah operasional
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah SIKIM yang beroperasi</li> </ul>	Jumlah SIKIM di Provinsi Riau yang beroperasi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pertumbuhan industry besar</li> </ul>		$\frac{\text{Jumlah industri besar}_{(n)} - \text{Jumlah industri besar}_{(n-1)}}{\text{Jumlah industri besar}_{(n-1)}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pertumbuhan nilai output industri</li> </ul>		$\frac{\text{Jumlah output industri}_{(n)} - \text{Jumlah output industri}_{(n-1)}}{\text{Jumlah output industri}_{(n-1)}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah koperasi yang bersertifikat</li> </ul>		$\frac{\text{Jumlah koperasi yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Seluruh koperasi}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase usaha kecil yang naik kelas</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang naik kelas}}{\text{Jumlah Seluruh usaha kecil}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dengan harga stabil</li> </ul>	Kestabilan harga bahan pokok dan barang penting
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Seluruh kasus pengaduan yang masuk}} \times 100\%$
16.	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan modal tetap bruto (PMTBP)</li> </ul>	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sisi konsumsi dalam 1 (satu) tahun
17.	<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Sumber Daya Kepemudaan yang berkarakter, maju, dan mandiri</li> <li>• Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Provinsi Riau Yang Maju dan Unggul</li> <li>• Jumlah Sumber Daya Kepemudaan yang Berkapasitas</li> <li>• Jumlah Sumber Daya Keolahragaan Yang</li> </ul>	<p>Jumlah Pemuda Kader + Jumlah Pemuda Pelopor + Jumlah Pemuda Wirausaha (Melalui Pelayanan Kepemudaan Dispora Prov. Riau)</p> <p>Jumlah Atlet Berprestasi Yang Dibina oleh Dispora : ( POPNAS + PEPARPENAS + POSPENAS + KEJURNAS PPLP + Kejuaraan Lainnya minimal Tingkat Wilayah )</p> <p>Jumlah Pemuda Kader + Jumlah Pemuda Pelopor + Jumlah Pemuda Wirausaha (Melalui Pelayanan Kepemudaan Dispora Prov. Riau)</p> <p>Jumlah Atlet Yang Dibina oleh Dispora Mengikuti Kejuaraan : POPNAS + PEPARPENAS + POSPEPENAS + KEJURNAS PPLP + Kejuaraan lainnya minimal Tingkat Wilayah</p>

FORMULASI PERHITUNGAN		
NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Kompetitif Nasional Ditingkat
18.	DINAS KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau</li> <li>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Perlindungan</li> <li>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Pengembangan</li> <li>Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau yang mendapatkan Pemanfaatan</li> <li>Persentase SDM yang mendapatkan Pembinaan</li> <li>Persentase Kelembagaan yang mendapatkan Pembinaan</li> </ul>
		$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukam}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$
		$\frac{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan}}{\text{Jumlah data obyek pemakuan kebudayaan}} \times 100\%$
		$\frac{\text{Jumlah obyek kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$
		$\frac{\text{Jumlah obyek kebudayaan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$
		$\frac{\text{Jumlah SDM kebudayaan yang terbina}}{\text{Jumlah SDM Kebudayaan}} \times 100\%$
		$\frac{\text{Jumlah lembaga kebudayaan yang terbina}}{\text{Jumlah lembaga kebudayaan}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
19.	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Akreditasi Perpustakaan</li> <li>• Persentase Peningkatan Pelayanan, Akseibilitas dan Mutu Perpustakaan</li> <li>• Indeks Manajemen Kearsipan</li> <li>• Persentase Pengelola Kearsipan</li> </ul>	<p>Nilai/prediket akreditasi perpustakaan Soeman Hs</p> $\frac{\text{Jumlah jenis layanan perpustakaan}}{\text{Jumlah sumber daya manusia layanan perpustakaan}} \times 100\%$ <p>Nilai / predikat kearsipan</p> $\frac{\text{Jumlah ASN pengelola arsip}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$
20.	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTUP</li> <li>• NTN</li> </ul>	$NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>It = Indeks yang diterima petani  Ib BPPBM = indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal</p> $NTN = \frac{Yt}{Et} \times 100\%$ <p>Yt = Yft + YNFT  Et = Eft + Ekt  Yt = Total Penerimaan Pelayanan (Rp.)  Et = Total Pengeluaran Nelayan  Yft = Total Penerimaan Nelayan dari Usaha Perikanan (Rp.)  YNFT = Total Penerimaan nelayan dari Non Perikanan (Rp.)</p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
			<p>Eft = Total Pengeluaran Nelayan untuk Usaha Perikanan (Rp.)  Ekt = Total Pengeluaran Nelayan untuk Konsumsi Keluarga Nelayan (Rp.)  T = Periode waktu (bulan, tahun, dan lain lain)</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTPI</li> </ul>	$NTPI = \frac{IT}{IB} \times 100\%$ <p>IT = indeks Harga yang diterima pembudidaya ikan  IB = Indeks Harga yang dibayar pembudidaya ikan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Produksi Perikanan (Ton)</li> </ul>	<p>Jumlah hasil Produksi Perikanan Tangkap (Laut dan Perairan umum daratan) ditambah dengan jumlah produksi perikanan budidaya</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Menurunnya IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unreported Fishing)</li> </ul>	
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Perikanan Produksi Budidaya</li> </ol>	<p><math>A = N \times \text{Prod}/n</math>  A = Hasil Perhitungan Produksi (angka agregat)  N = Jumlah Populasi (luas lahan (m<sup>2</sup>))  Prod = Jumlah Sampling  n = Jumlah Produksi Sampling (kg)</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</li> </ol>	<p><math>A = N \times \text{Prod}/n</math>  A = Hasil Perhitungan Produksi (angka agregat)  N = Jumlah Populasi (Jumlah kapal, alat laut)  Prod = Jumlah Sampling  n = Jumlah Produksi Sampling (kg)</p>
21.	DINAS PARIWISATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase peningkatan pengeluaran wisatawan</li> <li>• Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Pengeluaran Tahun } n - \text{Jumlah Pengeluaran Tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah Pengeluaran Tahun } (n - 1)} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara</li> </ul>	<p>Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)</li> </ul>	$\frac{\text{Lama Menginap Wisman}}{\text{Jumlah wisma yang menggunakan akomodasi}} \times 100\%$
22.	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks ketahanan pangan</li> </ul>	$100 - (H(G + (1 - G))^P + 0,5Q(1 - H(G + (1 - G))^P)) 100$ <p>Dimana:  H : rasio penduduk yang mengalami kekurangan pangan terhadap jumlah penduduk  G: proporsi angka kekurangan energi terhadap angka rata-rata kebutuhan energi  P : ketimpangan dalam distribusi yang diukur dengan koefisien GINI dari distribusi konsumsi energi  Q : koefisien variasi DES ketersediaan energi untuk konsumsi energi/protein</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Keamanan Pangan Segar</li> </ul>		$\frac{\text{Jumlah Pangan Segar (buah dan Sayur) yang bebas Residu Pestisida}}{\text{Jumlah sampel pangan segar yang diuji pestisida}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skor PPH Konsumsi</li> </ul>		<p>Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (% AKE X bobot masing-masing kelompok pangan)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skor PPH Ketersediaan</li> </ul>		<p>Jumlah angka yang dicapai dalam keragaman konsumsi kelompok pangan (% AKG X bobot masing-masing kelompok pangan)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Tanaman Pangan</li> </ul>	NTUP	$NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>It = Indek yang diterima petani  Ib BPPBM = indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Hortikultura</li> </ul>	NTUP	$NTUP = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
			<p>It = Indek yang diterima petani  Ib BPPBM = indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi Padi (Ton)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi Jagung</li> </ul>	<p>Jumlah luas panen padi tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan (Data Statistik Pertanian (SP) BPS Provinsi Riau)</p>
23.	<p><b>DINAS PERKEBUNAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Perkebunan</li> </ul>	<p>NTUP</p>	<p>Jumlah luas panen jagung tahun berkenaan dikali produktivitas tahun berkenaan (Data Statistik Pertanian (SP) BPS Provinsi Riau)</p> $NTUP = \frac{It}{Ib \text{ BPPBM}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (Ib BPPBM)</li> <li>Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan indeks harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung dengan menggunakan formula modified laspeyers indeks</li> </ul> <p>Sumber data : BPS</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi kelapa sawit</li> </ul>		<p><math>PRODUKSI = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produksi (kg)}}{1000}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester laporan</li> <li>Perhitungan jumlah produksi harus dalam bentuk/wujud yang sama dan diperlukan konversi dan penentuan wujud produksi yang akan dicatat</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah produksi kelapa</li> </ul>		<p><math>PRODUKSI = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produksi (kg)}}{1000}</math></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah produksi karet</li> </ul>		<p><math>PRODUKSI = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produksi (kg)}}{1000}</math></p>

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
24.	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi Sagu</li> <li>Nilai Tukar Pertanian Peternakan</li> </ul>	$\text{PRODUKSI} = \frac{\text{Luas Tanaman Menghasilkan (TM)} \times \text{Produksi (kg)}}{1000}$ $\text{NTUP} = \frac{It}{Ib_{BPPBM}} \times 100$ <p>It = Indek yang diterima petani Ib BPPBM = indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal</p>
25.	<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produksi Daging Ruminansia Lokal</li> <li>Persentase status kesehatan hewan</li> <li>Rasio elektifikasi</li> <li>Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib</li> <li>Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi</li> <li>Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik (KK)</li> <li>Intensitas Energi (TOE/Milyar Rupiah)</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Pemotongan Ternak Lokal} \times \text{Berat Karkas (Kg)}}{\text{Populasi} - \frac{\sum \text{Hewan Sakit}}{\text{Populasi}}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah RT yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah Total RT}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Izin Usaha Pertambangan yang tertib Adm, Teknis, Lingkungan dan Keunagan}}{\text{Jumlah Izin Usaha Pertambangan Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah}}{\text{Jumlah pengguna air tanah yang berizin}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Konsumsi Energi}}{\text{PDRB}}$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
26.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Realisasi Pencapaian Target Pembangunan Daerah</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Indikator hasil outcome program dalam RKPd pada tahun } n \text{ yang dicapainya baik}}{\sum \text{Indikator hasil outcome program}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Capaian Rata-Rata Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Akuntabel</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Indikator Sasaran RPJMD pada tahun } n \text{ yang capaiannya baik}}{\sum \text{Indikator Sasaran RPJMD}} \times 100$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase hasil kelibangan yang diimplementasikan</li> </ul>	$\frac{\sum \text{hasil kelibangan yang diimplementasikan}}{\sum \text{keseluruhan hasil kelibangan}} \times 100$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase hasil kerjasama pembangunan yang difasilitasi</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Kerjasama yang difasilitasi}}{\sum \text{keeseluruhan kerjasama}} \times 100$
27.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka Penerimaan Daerah</li> </ul>	Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah selama 1 tahun
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah</li> </ul>	$\frac{\text{realisasi } n - \text{realisasi } (n - 1)}{\text{realisasi tahun } (n - 1)} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul>	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
28.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opini BPK</li> </ul>	- Opini BPK Terhadap APBD Provinsi Riau sesuai ketentuan

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan penyusunan APBD Provinsi Riau</li> </ul>	Waktu penyampaian RAPBD – waktu pendandatangan Nota Kesepakatan KUA PPAS sesuai ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan penetapan APBD Provinsi Riau</li> </ul>	Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata-rata pemrosesan perintah membayar (SPM)</li> </ul>	Berdasarkan Pasal 129 Ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara umum Daerah (BUD) memproses SPM dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lam 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya SPM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini BPK terhadap Laporan pemerintah (LKPD)</li> </ul>	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase asset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan yang telah diinventarisasi}}{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklajuti hasil evaluasi Ranperda APBD</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kabupaten kota yang menindaklajuti Hasil evaluasi Ranperda APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota di Provinsi Riau}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklajuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah kabupaten kota yang menindaklajuti Hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota di Provinsi Riau}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
29.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Profesionalitas ASN</li> <li>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</li> <li>Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik</li> </ul>	Rata rata nilai indeks profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN  $\frac{\text{Jumlah rata rata survey kepuasan pelayanan administrasi kepegawian}}{\text{Jumlah PNS Provinsi Riau}} \times 100$
			$\frac{\text{Jumlah PNS Provinsi Riau yang mempunyai nilai kinerja baik}}{\text{Jumlah PNS Provinsi Riau}} \times 100$
30.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi minimal 20 jam pelajaran per orang per tahun</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP per orang per tahun}}{\text{Jumlah seluruh ASN}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Pelayanan Diklat</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus mengikuti diklat}}{\text{Jumlah seluruh ASN yang mengikuti diklat}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Kelulusan Peserta Diklat</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Kelulusan peserta Diklat}}{\text{Jumlah seluruh ASN yang mengikuti diklat}} \times 100\%$
31.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosentase Penanggulangan Bencana</li> <li>Prosentase Penanggulangan Bencana</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Total Usulan Penyelenggaraan Bencana Pada Tahun n}}{\text{Jumlah Total Usulan Penyelenggaraan Bencana Pada Tahun n}} \times 100\%$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prosentase Penanggulangan Bencana</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Bencana Pada Tahun n}}{\text{Jumlah Total Usulan Penyelenggaraan Bencana Pada Tahun n}} \times 100\%$

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
32.	<b>BADAN PENGHUBUNG</b>	Penanggulangan Bencana di Provinsi Riau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penghubung Badan</li> <li>• Indeks Kepuasan Stakeholder</li> <li>• Indeks Kepuasan Pengunjung Anjungan Riau</li> <li>• Indeks Demokrasi Indonesia</li> </ul>	$\frac{\text{Indeks kepuasan stakeholder} + \text{Indeks kepuasan pengunjung anjungan riau}}{2} \times 100\%$ <p>= Indeks kepuasan masyarakat kepada layanan badan penghubung</p> $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>= Indeks kepuasan masyarakat (Stakeholder)</p> $\frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>= Indeks kepuasan pengunjung anjungan riau</p>
33.	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Demokrasi</li> <li>• Indeks Lembaga Demokrasi</li> <li>• Indeks Kebebasan Sipil</li> <li>• Indeks Hak-Hak Politik</li> </ul>	$IDI_{\text{Provinsi Riau}} = \sum_{i=1}^3 P_{ij} I(A_i)$ <p>IDI Provinsi Riau = Indeks Demokrasi Provinsi Riau</p> <p>P<sub>i</sub> = Nilai Penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-I (i=1,2,3)</p> <p>I (A<sub>i</sub>) = Indeks aspek ke-i</p> $I(A_i) = \sum_{j=1}^n P_{ij} I(V_{ij})$ <p>I (A<sub>i</sub>) : Indeks Aspek ke i</p> <p>P<sub>ij</sub> : Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i</p> <p>I (V<sub>ij</sub>) : Indeks variabel ke j dari aspek ke i</p>



NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase layanan peningkatan kapasitas Anggota DPRD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>capaian terhadap kapasitas Anggota DPRD</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah nilai kepuasan layanan}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100\%$
36.	INSPEKTORAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK</li> <li>Persentase penyelesaian TLHP-BPK</li> <li>Persentase rekomendasi APIP yang ditindak lanjuti</li> <li>Jumlah OPD yang berkinerja baik</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang direkomendasikan BPK}}{\text{Jumlah rekomendasi BPK}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut yang direkomendasikan BPK}}{\text{Jumlah rekomendasi BPK}} \times 100\%$
			$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang direkomendasikan APIP (Inspektorat + Inspektorat Jenderal Kemendagri)}}{\text{Jumlah rekomendasi APIP}} \times 100\%$
			Jumlah OPD yang mendapat nilai Baik (B) dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah OPD dengan SPIP Level 3</li> </ul>		$\frac{\text{Jumlah OPD yang mendapat level 3 pada penerapan SPIP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Level Kapabilitas APIP</li> </ul>		Tingkat level kapabilitas Inspektorat yang hendak dicapai yang di Quality Assurance (QA) oleh BPKP
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah OPD yang diusulkan Predikat WBK/WBBM</li> </ul>		Jumlah OPD yang diterima usulannya oleh Kemenpan RB untuk penilaian WBK/WBBM

NO	PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase OPD yang dibina</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah OPD yang dibina}}{\text{Jumlah OPD yang ada}}$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Kabupaten/ Kota yang dibina</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang dibina}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota yang ada}}$

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**